

**IMPLEMENTASI PROGRAM KLINIK INOVASI DALAM
MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP INDEKS INOVASI DAERAH
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**ANJELITA
NPM 2016041008**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KLINIK INOVASI DALAM
MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP INDEKS INOVASI
DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**ANJELITA
2016041008**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KLINIK INOVASI DALAM MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP INDEKS INOVASI DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

ANJELITA

Klinik inovasi merupakan suatu program yang menyediakan tempat konsultasi sekaligus pendampingan kepada organisasi perangkat daerah terkait dengan indeks inovasi daerah. Program klinik inovasi telah dilaksanakan dengan 48 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan provinsi Lampung sebagai kelompok sasaran. Program klinik inovasi bertujuan memperkenalkan dan membuka wawasan perangkat daerah mengenai inovasi daerah. Pada indeks inovasi daerah, provinsi Lampung belum dapat konsisten terhadap kualitas inovasi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program klinik inovasi dalam memberikan pendampingan indeks inovasi daerah dan mengidentifikasi faktor pendukung serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program klinik inovasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menggunakan model implementasi program milik Jones (1996) yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan menunjukkan bahwa implementasi program klinik inovasi di provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik namun belum optimal karena masih ditemukan kendala seperti keterbatasan atau kurangnya sumber daya manusia dari pihak pelaksana program, pemahaman masing-masing organisasi perangkat daerah yang berbeda, dan ketidakdisiplinan petugas pelaksana dari perangkat daerah dalam mengikuti setiap kegiatan. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Sekertariat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka penetapan regulasi baru mengenai bentuk sanksi terkait dengan ketidakdisiplinan pegawai yang mengikuti program klinik inovasi.

Kata kunci: Implementasi program, klinik inovasi, indeks inovasi daerah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE INNOVATION CLINIC PROGRAM IN PROVIDING ASSISTANCE TO THE REGIONAL INNOVATION INDEX AT THE REGIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE

By:

ANJELITA

The innovation clinic is a program that provides a place for consultation and assistance to regional organizations related to the regional innovation index. The innovation clinic program has been implemented with 48 regional organizations within the Lampung provincial government as the target group. The innovation clinic program aims to introduce and open the insight of regional officials regarding regional innovation. In the regional innovation index, Lampung province has not been consistent in the quality of its innovation. This research aims to analyze the implementation of the innovation clinic program in providing assistance with the regional innovation index and identify supporting factors and obstacles faced in the process of implementing the innovation clinic program. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, documentation, and interviews. Research using Jones program implementation model (1996) of organization, interpretation, and application suggests that the implementation of the innovation clinic program in the lampung province is well under optimal because of constraints such as limitations or lack of human resources on the part of the program's enforcement, understanding of each of the regional tooling organizations, And misdiscipline of the regional administrators in following every activity. From the results of the study, researchers recommend the lampung province's department of research and development coordinate with lampung county districts in order to establish new regulations for disciplinary measures in conjunction with employee discipline programs for innovation clinics.

Keywords: Program implementation, innovation clinic, regional innovation indeks

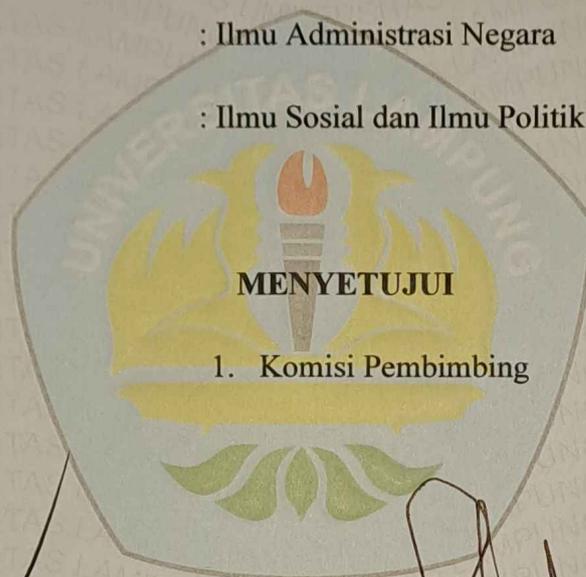
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM KLINIK
INOVASI DALAM MEMBERIKAN ASISTENSI
TERHADAP INDEKS INOVASI DAERAH
PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Anjelita

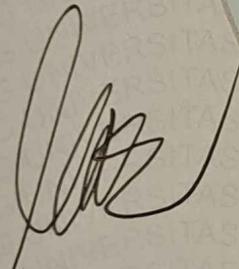
Nomor Pokok Mahasiswa : 2016041008

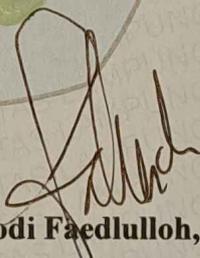
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

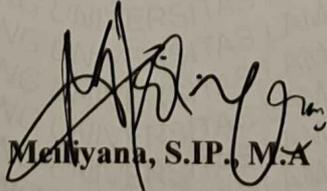


1. Komisi Pembimbing


Dr. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001


Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si
NIP. 198807122019031012

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meliyana, S.IP., M.A
NIP. 1974050220 200112 2 002

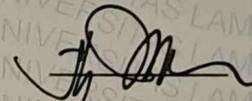
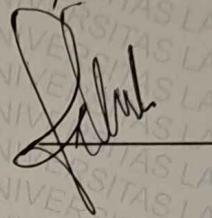
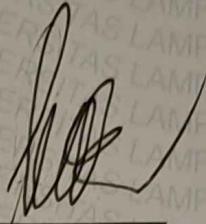
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

Ketua : Dr. Dian Kagungan, M.H

Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si

Penguji : Ita Prihantika, S.Sos., M.A



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Anjelita

NPM. 2016041008

RIWAYAT HIDUP



Penulis Penulis dilahirkan di Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung pada tanggal 28 Mei 2002. Dibesarkan dalam keluarga sederhana dari Bapak Maholik dan Ibu Ratinah dan merupakan anak terakhir dari lima saudara dan memiliki 4 kakak laki-laki yang bernama Lukman Abeng, Rian Riyanto, Dede Apriyadi, dan satu kakak perempuan yang bernama Deajeng Ratu.

Pada tahun 2007 Penulis mengawali pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak di TK Al-Amin Bandar Lampung, kemudian dilanjutkan Sekolah Dasar di SDN 3 Bumi Waras tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara, kemudian pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan KKN di Pekon Kubu Perahu Lampung Barat dan mengikuti MBKM FISIP yang dilakukan di BPN Provinsi Lampung selama 6 bulan, serta tahun 2024 penulis bekerja disalah satu kantor notaris di Kota Bandar Lampung sampai saat ini.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“There comes a day when you’re gonna look around and realize happiness is where you are.”

(Moana, 2016)

“Kita engga perlu sempurna untuk dapat bahagia. Mencintai ketidaksempurnaan itu engga apa-apa.”

(Imperfect, 2019)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT

Telah saya selesaikan karya ilmiah ini.

*Dengan segala kerendahan dan ketulusan
hati, Kupersembahkan karya tulis ini untuk:*

KELUARGAKU TERCINTA

Abah, Mamah, dan Keempat Kakakku

*Yang selalu memberikan do'a, kasih sayang,
dukungan, motivasi, baik dari segi moral maupun
material yang tida hentinya, serta pengorbanan,
dan keikhlasan yang tidak kenal lelah.*

Para Pendidik

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan dan do'a.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Klinik Inovasi Dalam Memberikan Asistensi Terhadap Indeks Inovasi Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Pada proses menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, masukan, saran, bantuan, dorongan, serta kritik dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Ibu Dr. Dian Kagungan, M.H. selaku dosen pembimbing utama sekaligus pembimbing akademik penulis, Terima kasih atas pembelajaran dan ilmu yang diberikan selama bimbingan dan perkuliahan.
2. Kepada Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih atas pembelajaran dan ilmu yang diberikan selama bimbingan. Terlepas dari hal itu terima kasih atas segala kesempatannya telah diberikan serta pengalaman yang bapak berikan saat bimbingan.
3. Kepada Dra Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Kepada Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Kepada Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku dosen penguji skripsi penulis sekaligus Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih untuk semua kritik, saran, motivasi, serta masukan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi menjadi lebih baik.

6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas semua ilmu yang diberikan selama perkuliahan kepada penulis.
7. Seluruh staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu penulis dalam proses administrasi studi sejak menjadi mahasiswa baru hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung terutama keluarga besar Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Stretegis daerah yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian untuk menyelesaikan skripsi penulis.
9. Kepada informan pendukung lainnya dalam penelitian ini, baik itu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
10. Kepada teman dekat penulis Mba Aya, terima kasih karena sudah menjadi teman diskusi yang selalu siap meluangkan waktu untuk memberikan segala bentuk dukungan pada penulis baik melalui kritik ataupun saran sekaligus motivasi serta dapat menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama proses penyelesaian skripsi. Semoga sehat selalu dan lancar untuk setiap mimpi yang akan dicapai semoga banyak kebaikan yang hadir dalam prosesnya.
11. Kepada Kunang's, dua teman terdekat selama masa perkuliahan penulis yaitu Alpi dan Cahya, terima kasih banyak karena sudah selalu membantu dan setia menemani, saling menjaga satu sama lain, sudah menjadi teman yang suportif tanpa pernah menjatuhkan satu sama lain serta selalu siap untuk menjadi tempat berkeluh kesah dari awal perkualihan sampai saat ini. Sukses selalu untuk dua temanku yang selalu bisa dibanggakan dalam hal apapun.
12. Kepada Alkaisar dan Ilham, terima kasih untuk tidak pernah membiarkan penulis sendirian selama proses perkuliahan sampai skripsi berlangsung mulai dari mengurus berkas sampai ke bimbingan selalu ditemani. Semoga kedepannya di hidup kalian akan ada banyak hal-hal baik yang berdatangan.
13. Kepada teman-teman dekat penulis yaitu Kita-Kita Inilah Siapa Lagi, Febby, Ace, Payja, Lepha, Meli, dan Rima terimakasih karena tetap menjadi teman yang selalu ada dan tidak pernah berubah sampai saat ini serta selalu siap sedia untuk menghibur dan menerima segala cerita yang disampaikan oleh penulis.

14. Kepada Luntung yaitu Anjes, Syeva, dan Rara, terima kasih untuk setiap kenangan yang diciptakan dan selalu bersedia dijadikan tempat berbagi cerita dan menjadi hiburan penulis dengan celetukannya serta semangatnya untuk satu sama lain.
15. Kepada Widia dan Rofah terima kasih sudah selalu memberikan dukungan serta menjadi teman yang selalu memberikan motivasi selama penulis menyelesaikan perkuliahan ini.
16. Kepada Avisia dan Dila, terima kasih telah menjadi bagian dimasa perkuliahan penulis, semoga sukses selalu untuk kedepannya.
17. Kepada teman-teman ADAMANTIA, terima kasih untuk setiap momen suka dan dukanya serta banyak pengalaman baru yang diberikan untuk penulis selama proses perkuliahan ini.
18. Kepada teman-teman KKN Kubu Perahu, Rofah, Yunika, Ivanka, Yurisman, Vito dan Kak Galih, terima kasih sudah berbagi pengalaman dan cerita selama 40 hari dan menjadi bagian cerita di masa perkuliahan penulis.
19. Kepada Datuk Irfan, terima kasih karena sudah senantiasa selalu mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
20. Kepada Staf Kanwil BPN Provinsi Lampung terkhusus di Tata Usaha, Pak Adi, Pak Teguh, Bu Ety, Pak Martin, Pak Kartiko Kak Wawan, Kak Gamel, Kak Yoga, Kak Rico, Mba Vanez, Mba Estina, Mba Devi, dan Mba Resti terima kasih untuk pembelajaran serta pengalamannya selama 6 bulan kepada penulis akan menjadi cerita dalam proses perkuliahan penulis.
21. Untuk kedua orangtua tercinta, Abah dan Mamah, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang tidak banyak menuntut pada anaknya serta segala kasih sayang dan doa serta perjuangan yang selalu diberikan dalam mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya agar dapat mencapai setiap mimpi yang diinginkan.
22. Kepada Kakak-kakakku A Abeng, A Rian, A Dede, Mba Ajeng dan Mba Yuli, terima kasih atas wejangan dan nasihat sekaligus sudah selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah serta selalu mau direpotkan urusan sekolah adiknya hingga saat ini.
23. Kepada diri sendiri, terima kasih banyak Anjelita sudah mampu menyelesaikan tugas ini dari awal sampai akhir dengan sangat baik walaupun jalannya tidak selalu lurus tapi keren banget udah bisa selesai tepat waktu.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Konsep Kebijakan Publik	12
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.2.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	13
2.2.3 Proses Kebijakan Publik	15
2.3 Konsep Implementasi.....	17
2.3.1 Definisi Program	17
2.3.2 Implementasi Program	18
2.3.2 Model-Model Implementasi Program.....	19
2.3.3 Proses Implementasi Program.....	24
2.4 Program Klinik Inovasi.....	26
2.5 Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Tipe Penelitian	30
3.2 Fokus Penelitian.....	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
3.6 Teknik Keabsahan Data	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41

4.1.1	Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	41
4.2	Hasil Penelitian	44
4.2.1	Implementasi Program Klinik Inovasi dalam Memberikan Asistensi Terhadap Indeks Inovasi Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	45
4.2.2	Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Implementasi Program Klinik Inovasi dalam Memberikan Asistensi Terhadap Indeks Inovasi Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	72
4.3	Pembahasan Penelitian.....	78
4.3.1	Implementasi Program Klinik Inovasi dalam Memberikan Pendampingan Indeks Inovasi Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	79
4.3.2	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Klinik Inovasi dalam Memberikan Pendampingan Indeks Inovasi Daerah Pada Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	116
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	121
5.1	Kesimpulan	121
5.2	Saran	122
	DAFTAR PUSTAKA	124
	LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Peringkat Provinsi Lampung dalam Indeks Inovasi Daerah	2
2. Tahapan Klinik Inovasi	4
3. Matriks Penelitian Terdahulu	8
4. Data Informan dalam Penelitian.....	35
5. Dokumentasi	36
6. Klasifikasi Pembagian Tugas Program Klinik Inovasi	47
7. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Provinsi.....	48
8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Program Klinik Inovasi.....	66
9. Jadwal Pelaksanaan Monitoring Penginputan Data Indeks Inovasi Daerah Provinsi Lampung	68
10. Matriks Dimensi Pengorganisasian.....	93
11. Daftar Desa Tertinggal di Provinsi Lampung	104
12. Matriks Dimensi Interpretasi	107
13. Matriks Dimensi Penerapan	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	29
2. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif	37
3. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	43
4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi.....	55
5. Struktur Organisasi dan Alur Koordinasi.....	82

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi pada pemerintahan daerah merupakan cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mendukung kinerja organisasi khususnya pemerintahan daerah. Untuk berinovasi pemerintah mengeluarkan kebijakan inovasi dengan tujuan mampu menciptakan berbagai inovasi baru. Inovasi pemerintah daerah mendorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan pemerintah daerah (Hutagalung & Hermawan, 2018). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, aturan tersebut memberikan keleluasaan kepada setiap instansi pemerintah agar dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya *good governance*.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui kualitas inovasi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung menghadirkan suatu program untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan serta pembuatan inovasi daerah pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung. Adanya pendampingan atau asistensi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam perumusan program inovasi daerah.

Klinik inovasi merupakan program dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Provinsi Lampung sebagai forum konsultasi dan

koordinasi antarperangkat daerah dalam pengembangan, penerapan, serta pelaporan inovasi daerah. Klinik Inovasi yang berisi pendampingan serta asistensi dalam pelaksanaan dan penyusunan inovasi-inovasi daerah di Provinsi Lampung. Sebagai inovasi daerah di provinsi Lampung antara lain SiGajah (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Silabo (Sigap Layanan Laboratorium) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, serta Kartu Asuransi Nelayan Berjaya dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung ada 48 perangkat daerah yang wajib hadir setiap tahunnya melaporkan inovasi-inovasi atau program yang ada di Provinsi Lampung. Tentunya hal ini jika berjalan dengan lancar akan menjadi daya saing serta meningkatkan kualitas pemerintah daerah Provinsi Lampung. Berikut merupakan peringkat inovasi melalui Indeks Inovasi Daerah (IID)

Tabel 1. Peringkat Provinsi Lampung dalam Indeks Inovasi Daerah

No.	Tahun	Peringkat
1.	2020	Peringkat 3
2.	2021	Peringkat 15
3.	2022	Peringkat 8
4.	2023	Peringkat 10

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Jika melihat hal tersebut, provinsi Lampung sempat berada pada peringkat 3 tertinggi di Indonesia sebagai provinsi terinovatif namun tahun 2021 mengalami penurunan peringkat kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 sampai akhirnya pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali berada pada peringkat 10 dengan memperoleh predikat provinsi inovatif. Klinik inovasi ada untuk melakukan pendampingan kepada perangkat-perangkat daerah. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan pada setiap tahunnya Indeks Inovasi Daerah (IID) selalu berubah dalam hal penilaian inovasi yang dilampirkan atau dilaporkan. Maka dari itu, diperlukan klinik inovasi untuk melakukan pendampingan secara mendalam kepada perangkat-perangkat daerah melalui beberapa tahapan yang telah disediakan.

Namun, berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung yaitu Winaryanti pada tanggal 08 Oktober 2023 yang menjadi permasalahan adalah ternyata banyak organisasi perangkat daerah yang tidak rutin mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti klinik inovasi sebanyak 6 tahapan serta masih terdapat operator atau petugas yang dikirimkan setiap perangkat daerah selalu berganti-ganti mengakibatkan operator atau petugas tersebut belum memahami penginputan indeks inovasi daerah dengan baik dan benar. Padahal jika tahapan-tahapan itu dilaksanakan dengan baik dapat membantu dan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat atau perangkat daerah itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, setiap daerah dan setiap perangkat daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga inovasi yang diterapkan pun harus disesuaikan dengan konteks setempat. Pendampingan eksklusif dapat membantu perangkat daerah dalam memahami keragaman inovasi daerah dan memilih inovasi yang tepat untuk diterapkan di daerahnya. Pemahaman perangkat daerah terkait inovasi daerah yang berbeda memerlukan pendampingan eksklusif. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik, sehingga inovasi yang diterapkan harus disesuaikan dengan konteks setempat. Pendampingan eksklusif dapat membantu perangkat daerah dalam memahami konsep inovasi daerah, mengidentifikasi potensi inovasi di daerahnya, dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengimplementasikan inovasi tersebut. Berikut ini merupakan 6 tahapan klinik inovasi yang harus diikuti oleh perangkat daerah yang ada di Provinsi Lampung:

Tabel 2. Tahapan Klinik Inovasi

No.	Tahapan	Keterangan
1.	Evaluasi	Hal ini bersangkutan dengan apa yang menjadi kekurangan dalam inovasi-inovasi daerah Provinsi Lampung pada tahun sebelumnya dan yang menjadi kendala dalam perumusan serta pembuatan Klinik Inovasi
2.	Sosialisasi	Penyampaian kepada perangkat daerah terkait perubahan aturan dan indikator baru dalam penilaian inovasi daerah
3.	Pendampingan	Pengumpulan rancang bangun inovasi daerah yang akan dikaji bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung apakah telah sesuai dengan indikator penilaian Kemendagri yang telah diberikan.
4.	Asistensi	Pengawasan dalam pengimputan rancangan inovasi daerah yang telah sesuai dengan indikator penilaian dari Kementerian Dalam Negeri
5.	Validasi	Pengecekan kembali terkait <i>evidence base</i> setiap inovasi yang diajukan apakah telah terpenuhi
6.	Finalisasi	Tahap akhir dalam proses klinik inovasi dimana dilakukan seleksi kembali mengenai kelayakan inovasi apa saja yang akan dikirim karena hal ini akan langsung terhubung oleh tim Pembina inovasi Kemendagri dan penilaian inovasi.

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan Tabel 2. dapat di lihat bahwa setiap tahapan-tahapan klinik inovasi saling berhubungan satu sama lain. Jika salah satu tahapan terlewati atau tidak diikuti maka dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaktahuan perangkat daerah dalam merumuskan atau penyusunan inovasi daerah Provinsi Lampung.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 03 Agustus 2023 melalui Kepala Sub Koordinator Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah yaitu Shinta Fitriana, diketahui bahwa selama pendampingan melalui klinik inovasi yang berjumlah 6 tahapan untuk persiapan Indeks Inovasi Daerah (IID) kekurangan sumberdaya dalam pelaksana klinik inovasi karena pada Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung hanya 3 orang saja yang benar-benar memahami Indeks Inovasi Daerah (IID) padahal selama 6 tahap berlangsung harus menghadapi 48 organisasi perwakilan perangkat daerah yang dapat menyebabkan

kewalahan dalam memberikan pendampingan atau tidak tersampainya informasi dengan baik. Pada Bidang Perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung juga mengikuti kegiatan tersebut untuk mengusulkan program-program atau inovasi. Sementara itu, tugas untuk bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan pada kegiatan kajian inovasi dan indeks inovasi daerah adalah Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan pendampingan kepada perangkat-perangkat daerah yang ada, tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun jika dikonfirmasi kepada Bidang Perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Eli menyatakan bahwa mungkin yang menjadi permasalahan mengapa perangkat daerah tidak konsisten mengikuti tahapan klinik inovasi adalah karena pada setiap pertemuan klinik inovasi tersebut cenderung memiliki waktu yang relatif singkat dengan pelaksana program yang terbatas dan panitia yang terlibat tidak seluruhnya berasal dari anggota bidang yang menaungi program klinik inovasi itu sendiri.

Hal tersebut diakibatkan karena keterbatasan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh pihak pelaksana program dari bidang penguatan inovasi dan kebijakan strategis daerah. Sehingga masih terdapat pegawai yang memang belum sepenuhnya mengerti mengenai indeks inovasi daerah itu sendiri. Sehingga harus menunggu pegawai yang benar-benar mengerti terkait hal tersebut Keterbatasan waktu yang disediakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung menjadi salah satu penghambat implementasi program klinik inovasi karena melihat sikap organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih belum menyadari pentingnya mengikuti setiap rangkaian tahapan klinik inovasi secara berkala dan tetap konsisten. Keterbatasan sumber daya manusia dari pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagai pelaksana program Klinik Inovasi itu sendiri yang akan memberikan pendampingan terkait

dengan indeks inovasi daerah maka akan mengakibatkan tidak optimalnya kinerja yang diberikan serta dengan hasil tujuan yang kurang maksimal tentunya hasil ini sebenarnya sudah diantisipasi atau ditemukan lebih lama oleh Syahrinal dan Casmiwati (2024) dalam penelitiannya terkait dengan pentingnya dukungan sumber daya manusia yang kompeten dari pihak pelaksana program dalam mencapai keberhasilan tujuan dari program yang diselenggarakan.

Berkaitan hal diatas, program klinik inovasi dibuat untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Tujuan dari program klinik inovasi adalah memastikan bahwa setiap operator/petugas dari perangkat daerah dapat melampirkan berbagai inovasi atau program yang sudah dibuat pada setiap organisasi perangkat daerah untuk dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Klinik Inovasi Dalam Memberikan Asistensi Terhadap Indeks Inovasi Daerah (IID) Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program klinik inovasi dalam memberikan asistensi terhadap indeks inovasi daerah (IID) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung.
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang ditemui pada implementasi program klinik inovasi saat pendampingan indeks inovasi daerah (IID) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan suatu sasaran yang ingin dicapai. Maka, tujuan penelitian yang ingin peneliti dapatkan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh penjelasan serta analisa mendalam terkait proses implementasi Program Klinik Inovasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam membangun inovasi daerah serta persiapan penganugerahan inovasi daerah atau *innovative government award*.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Klinik Inovasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara terutama dalam implementasi program klinik inovasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini kiranya dapat membantu dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Masyarakat umum dan lembaga pemerintahan lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai pedoman untuk memperkaya teori yang digunakan dalam kajian penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu merupakan bahan referensi dan inspirasi untuk peneliti dalam memberikan kejelasan terkait perbedaan dan persamaan pada objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan memberikan pembaruan terkait dengan objek kajian pada implementasi program. Penelitian terdahulu dapat juga digunakan sebagai data pendukung yang relevan.

Tabel 3. Matriks Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
Alif Listiansyah (2024)	Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kesehatan reproduksi remaja pada sekolah menengah atas di Provinsi Lampung secara keseluruhan sudah diterapkan dan mengalami penurunan kasus perkawinan anak akibat komitmen aktor pelaksana dalam memahami program tersebut. Akan tetapi, pada program ini masih memiliki kelemahan pada kekurangan jumlah sumber daya manusia sebagai pihak yang menjalankan program serta metode penyampaian informasi kepada kelompok sasaran program yang	Persamaan Penelitian persamaan penelitian terletak pada fokus penelitian terkait dengan model implementasi program menurut Jones (1996). Perbedaan Penelitian perbedaan penelitian terletak pada lokus dan objek penelitian yaitu terkait program kesehatan reproduksi remaja pada sekolah menengah atas (SMA) di salah satu sekolah pada Kabupaten Lampung Tengah.

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
Maya Novita Sari (2023)	Implementasi Pengembangan Ruang Kepemudaan (<i>Youth Space</i>) di Kecamatan Coblong Kota Bandung	<p>belum maksimal karena tingkat partisipasi yang kurang.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian dalam pengembangan <i>youth space</i> dikelola oleh camat dengan membentuk perangkat pengelola <i>youth space</i> berdasarkan surat keputusan Camat Coblong. Terbentuknya perangkat pengelola <i>youth space</i> Kecamatan Coblong belum memiliki rencana strategis dalam pengembangan sehingga belum banyak program dan kegiatan kepemudaan dilaksanakan oleh pengelola <i>youth space</i>. Sosialisasi yang dilakukan pihak pengelola <i>youth space</i> juga tidak berkelanjutan atau masih minim baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial membuat banyak pemuda di daerah Kecamatan Coblong yang tau keberadaan <i>youth space</i> dan tujuannya. Para pengelola belum sepenuhnya memahami pengembangan <i>youth space</i> dari rendahnya intensitas kegiatan pada lingkungan <i>youth space</i> itu sendiri.</p>	<p>Persamaan Penelitian persamaan penelitian terletak pada fokus penelitian implementasi yang mencoba melihat dengan model implementasi program menurut Jones (1996).</p> <p>Perbedaan Penelitian perbedaan penelitian terletak pada lokus dan objek penelitian yaitu terkait pengembangan ruang kepemudaan (<i>youth space</i>) di Kecamatan Coblong Kota Bandung</p>
Mulyadi, Kurniansyah & Santoso (2021)	Implementasi Penerapan Aplikasi Sambara dalam Administrasi Wajib Pajak Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Kabupaten Karawang	<p>Hasil penelitian Impelementasi Penerapan Aplikasi Sambara dalam Administrasi Wajib Pajak Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa Pengorganisasian di</p>	<p>Persamaan Penelitian persamaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang melihat suatu aplikasi ketika diterapkan melalui sudut pandang model implementasi program yang dimiliki oleh Jones (1996).</p>

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
		<p>Samsat Kabupaten Karawang sudah cukup baik dan para pegawai samsat Kabupaten Karawang sudah hampir semuanya memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam melakukan kegiatan berkerja, dan mengetahui tata cara membayar pajak secara online. Interpretasi masyarakat terhadap inovasi aplikasi sambara sangat di terima baik oleh masyarakat kabuapten Karawang karena dapat memudahkan dalam pembayaran pajak karena masyarakat tidak harus mengantri berjam-jam. Hal ini yang membuat program ini di terima oleh masyarakat. Penerapan aplikasi sambara di Kabupaten Karawang memang cukup baik terbukti pada data yang didapat bahwa ada kenaikan pada tahun 2018 sampai dengan saat ini masyarakat yang membayar pajak makin banyak. Proses untuk melakukan registrasi pembayaran pajak tidak menyulitkan jadi masyarakat kabupaten Karawang sangat terbantu.</p>	<p>Perbedaan Penelitian perbedaan penelitian terletak pada lokus dan objek penelitian yaitu terkait penerapan aplikasi pembayaran pajak selama masa pandemi <i>covid-19</i> berlangsung.</p>
Syahrinal dan Casmiwati (2024)	Implementasi Program Generasi Berencana Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Jawa Timur Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya sudah berjalan cukup baik. Adapun faktor yang menjadi pendukung yaitu adanya sumber daya manusia yang</p>	<p>Persamaan Penelitian persamaan penelitian terletak pada fokus penelitian terkait dengan model implementasi program menurut Jones (1996) yang sama-sama ingin melihat 3 indikator penting yang saling mempengaruhi dalam pelaksanaan suatu implementasi program.</p>

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
		kompeten dari pihak pelaksana program yaitu berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, struktur organisasi yang secara spesifik menjalankan program Generasi Berencana, petunjuk teknis yang jelas, sosialisasi dan media yang diciptakan dengan variatif, serta sarana prasarana yang memadai. Sedangkan aspek yang kurang mendukung adalah dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat, terutama para remaja yang mengetahui manfaat dari Program Generasi Berencana itu sendiri.	Perbedaan Penelitian perbedaan penelitian terletak pada lokus dan objek penelitian yaitu terkait program generasi berencana.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan penjabaran penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu terletak pada metode pendekatan kualitatif deskriptif dan fokus penelitian yang menekankan pada implementasi program dengan teori Jones (1996) yang terdiri dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini memiliki fokus penelitian pada bagaimana implementasi program klinik inovasi dalam memberikan asistensi terhadap indeks inovasi daerah pada organisasi perangkat daerah dengan menggunakan teori Jones (1996) yang terdiri dari indikator organisasi, interpretasi, dan penerapan.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris yaitu *public policy*. Wibawa dan Darwin menerjemahkan kata *policy* menjadi ‘kebijakan sementara Islamy dan Wahab menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Anggara, 2014). Konsep *public policy* mulai berkembang sekitar pada tahun 1970 dalam ilmu administrasi publik. Hal tersebut sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Charles O. Jones dalam Mustari (2015), istilah kebijakan (*policy*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan *grand design*. Anderson dalam Widodo (2021) mengatakan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Hal tersebut selaras dengan pendapat kebijakan publik yang diartikan sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan dan diputuskan oleh seorang aktor politik baik individu maupun kelompok berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu keadaan. Sementara itu, Thomas R. Dye dalam Anggara (2014) memperkuat pendapat yang sudah disampaikan sebelumnya dengan memberikan pemahaman bahwa kebijakan publik diartikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” yaitu kebijakan publik sebagai bentuk apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat para ahli, secara umum kebijakan publik berarti serangkaian sikap atau tindakan yang diputuskan oleh pemerintah berupa aturan atau keputusan yang kemudian dilaksanakan oleh pihak penyelenggara negara merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan

dalam suatu sistem pemerintahan sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan penyelesaian mengenai suatu permasalahan yang terjadi dan terus berkembang di masyarakat. Kebijakan publik menjadi suatu keputusan yang mengikat untuk orang banyak karena dibuat oleh pemegang otoritas publik yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak melalui proses pemilihan atas nama masyarakat.

2.2.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat bukan tanpa maksud dan tujuan yang jelas, dimana maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan banyak bentuk, bervariasi, dan intensitasnya. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk mencari solusi yang menghasilkan sebuah kebijakan publik. Adapun ciri-ciri kebijakan publik yang dikemukakan oleh Wahab dalam Mustari (2015) antara lain:

1. Kebijakan publik merupakan tindakan yang direncanakan mengarah pada tujuan yang sudah ditetapkan.
2. Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan yang pasti.
4. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Bentuk negatif dari suatu kebijakan meliputi keputusan para pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam suatu permasalahan di mana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Anderson dalam Mustari (2015) mengelompokan jenis-jenis kebijakan publik antara lain:

1. *Substantive and procedural Policies Substantive policy*

Substantive policy dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sedangkan *procedural policy* dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*).

2. *Distributif, Redistributif, and Regulatory Policies*

1) *Distributif Policy* suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok atau perusahaan-perusahaan.

2) *Redistributif policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak.

3) *Regulatory Policy* yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap tindakan.

3. *Public Goods and Private Goods Policies*

Public goods policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Sementara *private goods policy* yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu (perorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

Dapat dipahami suatu kebijakan publik memiliki ciri-ciri khusus yang biasanya bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam sistem politik, misalnya para ketua eksekutif, legislator, hakim, administrator, ketua adat, dan sebagainya yang akan bertanggungjawab atas berbagai bentuk urusan politik dan berhak mengambil tindakan tertentu selama masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka. Selain itu, kebijakan publik memiliki kelompok sasaran yang sudah diputuskan biasanya dalam hal ini adalah sebagai upaya memenuhi kepentingan masyarakat sehingga kebijakan publik harus bersifat positif dengan resiko kegagalan atau hasil yang negatif sekecil mungkin.

2.2.3 Proses Kebijakan Publik

Proses formulasi kebijakan publik menjadi langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Pada tahap ini akan sangat menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Sehingga tingkat keseriusan dari para pembuat kebijakan (*policy maker*) sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahan (Mustari, 2015). Sementara itu, Thomas R. Dye dalam Anggara (2014) mengemukakan suatu proses kebijakan publik meliputi beberapa hal yaitu:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*) Dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntunan atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
Merupakan aktivitas memberikan fokus perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)
Merupakan tahap pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, serta kongres.
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas pihak eksekutif yang terorganisasi.
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, media massa, dan masyarakat (publik).

Sedangkan menurut James Anderson dalam Pasolong (2010), menetapkan proses kebijakan publik antara lain:

1. Formulasi Masalah

Berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan, apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan, dan bagaimana masalah tersebut dapat masuk agenda pemerintahan.

2. Formulasi Kebijakan

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut, serta siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan.

3. Penentuan Kebijakan

Berhubungan dengan bagaimana alternatif ditetapkan, persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan, serta apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Implementasi Kebijakan

Berkaitan dengan siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang dikerjakan selama proses ini berlangsung, dan apa dampak yang dihasilkan dari isi kebijakan itu sendiri.

5. Evaluasi Kebijakan

Berkaitan dengan pengukuran tingkat keberhasilan atau dampak dari kebijakan, siapa yang melakukan evaluasi kebijakan tersebut, apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan, serta terdapat atau tidaknya tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa pembuatan kebijakan menyangkut seluruh tahapan dalam kebijakan publik dan perumusan kebijakan adalah salah satu bagian di dalamnya, kemudian konsep perumusan kebijakan sama dengan konsep formulasi kebijakan, sampai pada output dari formulasi kebijakan adalah penetapan kebijakan publik berupa peraturan perundang-undangan. Implementasi tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga bentuk kesepakatan atau komitmen pada setiap tahapan diantara sejumlah aktor atau pelaku yang terlibat untuk mencapai peluang keberhasilan suatu kebijakan.

2.3 Konsep Implementasi

2.3.1 Definisi Program

Kebijakan publik dan program merupakan dua hal yang saling berhubungan. Hal tersebut dapat dilihat melalui kebijakan publik yang merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Sementara untuk program, di mana program merupakan kumpulan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga kebijakan publik dapat menjadi dasar terciptanya dari suatu program (Listiansyah, 2024). Selaras dengan hal tersebut Dwi (2017) berpendapat bahwa program akan menunjang proses implementasi ketika berlangsung yang disebabkan oleh beberapa aspek dalam program itu sendiri antara lain yaitu:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai
2. Terdapat kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan itu
3. Terdapat aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
4. Terdapat perkiraan anggaran yang dibutuhkan
5. Terdapat strategi dalam pelaksanaannya.

Program menjadi suatu tahapan yang harus dilakukan dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisikan langkah-langkah atau strategi apa yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan menjadi unsur pertama yang harus ada selama proses tercapainya kegiatan implementasi. Westra (1989) mengatakan bahwa program merupakan rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya dan Siagian ikut berpendapat bahwa penyusunan suatu program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu (Listiansyah, 2024). Ciri-ciri tersebut seperti seperti:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Suatu kerangka kebijakan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran biaya yang diperkirakan dan berbagai manfaat yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut (Bintoro dalam Listiansyah 2024).

Secara umum dapat dipahami bahwa program adalah penjabaran atau uraian dari suatu perencanaan atau sebagai kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan yang diharapkan mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

2.3.2 Implementasi Program

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Berdasarkan kamus besar Webster menurut Wahab dalam Anggara (2014) *to implement* yaitu mengimplementasikan yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Kemudian Widodo (2021) mengatakan bahwa, implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber daya seperti manusia, dana, dan kemampuan operasional oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Grindel dalam Mulyadi (2015) memberikan pandangan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Suatu kebijakan akan menghasilkan program yang merupakan rangkaian kegiatan sebagai perwujudan dari kebijakan itu sendiri dalam upaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan diharapkan mampu memberikan dampak baik terhadap penerima program tersebut (Bahri dkk, 2020). Program menurut Hasibuan dalam Pratama, dkk (2019) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan menciptakan hasil yang berpengaruh, yang mana di dalamnya telah terdapat sasaran, kebijakan, prosedur sebagai unsur dalam pelaksanaannya. Program merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaannya. Jones (1996) mengemukakan bahwa implementasi program sebagai *implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect* yang berarti implementasi merupakan serangkaian kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Arif dalam Dwi (2017) mengemukakan bahwa implementasi program merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan karena merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang sudah dijelaskan dapat dipahami secara sederhana bahwa implementasi program merupakan salah satu tahapan yang penting dalam aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran untuk dapat merealisasikan serta mencapai tujuan-tujuan yang telah dirancang sebelumnya.

2.3.2 Model-Model Implementasi Program

Suatu kebijakan atau peraturan tidak akan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tanpa melalui proses implementasi yang baik. Adapun model-model implementasi kebijakan publik yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan menurut Matland dalam Hamdi (2014) terbagi dalam dua kelompok. Pertama adalah kelompok pendekatan dari atas (*top-down*), bagaimana kita dapat melihat seseorang yang merancang atau merumuskan kebijakan sebagai aktor sentral atau tokoh

utama dengan tujuan kebijakan agar bersifat jelas dan konsisten, meminimalkan jumlah aktor, membatasi rentang perubahan yang diperlukan, dan menempatkan tanggung jawab implementasi pada instansi yang bersimpati dengan tujuan kebijakan. Kedua, kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*) yang menekankan pada dua hal yaitu kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan serta berfokus pada variabel yang bersifat mikro.

Pada pelaksanaannya, saat proses implementasi berlangsung tidak hanya menggunakan satu model untuk menjadi tolak ukur dalam upaya mencapai tujuan dari suatu program ataupun kebijakan suatu organisasi. Jones (1996), berpendapat bahwa program merupakan cara yang disahkan untuk mencapai tujuan di mana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan untuk tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai. Sehingga beberapa ahli memiliki pendapat terkait dengan model implementasi program yang digunakan dalam upaya mencapai keberhasilan dari suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan. Adapun model-model implementasi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu program antara lain

1. Implementasi Kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014), menjelaskan bahwa terdapat beberapa variabel bebas yang saling berkaitan dalam implementasi antara lain yaitu:

1) Standar dan sasaran program/kebijakan

Standar dan sasaran program/kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik antara para agen implementasi.

2) Sumber daya

Implementasi perlu didukung oleh sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*).

3) Karakteristik organisasi pelaksana

Berkaitan dengan sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan untuk implementasi program/kebijakan, termasuk karakteristik partisipan yang mendukung ataupun menolak, sifat opini publik yang ada dilingkungan, dan apakah *elite* politik mendukung implementasi kebijakan tersebut.

4) Komunikasi antar organisasi pada pelaksanaan program/kebijakan
 Pada beberapa kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu dukungan dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

5) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi tersebut.

6) Disposisi implementor mencakup tiga hal penting

Respon implementor terhadap kebijakan/program yang akan mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan atau program. Kedua yaitu kognisi merupakan pemahamannya terhadap kebijakan, serta intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2. Implementasi Program menurut David C. Korten (1988)

Keberhasilan suatu implementasi menurut David C. Korten dalam Bahri, dkk (2020), menyebutkan bahwa model ini menggunakan pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Korten menggambarkan model implementasi dengan tiga elemen dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Indikator keberhasilan implementasi program sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian antara program dengan pemanfaat
Terkait dengan kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- 2) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana
Kesesuaian antara tugas yang ada dalam program tersebut dengan kemampuan organisasi selaku pelaksana program. Greenberg dan Baron dalam Wibowo (2013) berpendapat bahwa organisasi merupakan suatu sistem sosial yang ada pada masyarakat yang dilakukan secara terstruktur terdiri dari kelompok dan individu yang bekerja sama dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, program dengan organisasi menjadi suatu hal yang berkaitan, dimana organisasi dapat menjadi suatu wadah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya terhadap pelaksanaan suatu program.
- 3) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana pelaksana
Terkait dengan kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran.

Bahri dkk (2020), berpendapat bahwa pola yang dikembangkan oleh Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil atau sesuai dengan apa yang sudah diharapkan jika tiga unsur implementasi program tersebut tidak dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan jika *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran maka *output* yang dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang menjadi syarat dalam program itu sendiri, maka organisasi tidak mampu menyampaikan *output* program dengan tepat. Jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Kesesuaian

antara tiga unsur implementasi program mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

3. Implementasi Program menurut Charles O. Jones (1996)

Suatu instansi yang berbeda sudah pasti akan memerlukan strategi yang berbeda pula dalam mendapatkan atau mempertahankan suatu dukungan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan melalui program yang diterapkan. Charles O. Jones (1996) menjelaskan bahwa pelaksanaan implementasi program dapat dilihat melalui tiga aktivitas utama yaitu sebagai berikut:

1) Organisasi

Penting untuk dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak pada proses kebijakan. Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang telah dirancang. Organisasi dalam implementasi kebijakan berkaitan erat dengan birokrasi sehingga memerlukan perhatian paling utama karena sangat penting untuk pemhasan konsep birokrasi. Setiap kegiatan memerlukan birokrasi agar dapat berkomunikasi dengan pihak pembuat kebijakan dan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang telah direncanakan. Jones mengartikan kegiatan pada organisasi aktivitas dalam pembentukan sumber daya, unit-unit, serta metode-metode yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada program dengan tujuan dari organisasi merupakan melaksanakan program-program yang telah dirumuskan.

2) Interpretasi

Pada aktivitas ini, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Proses kebijakan sangat tergantung pada komunikasi antar pihak yang terlibat didalamnya serta sejauh mana pemahaman yang diperoleh. Program yang dilakukan harus dibuat secara jelas, tepat, dan juga akurat terhadap ketentuan yang ada. Hal tersebut

bertujuan untuk pelaksana program lebih memahami serta mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam mengimplementasikan program yang telah dirancang sehingga tujuan program yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai dengan baik.

3) Penerapan

Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana di mana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun peraturan-peraturan, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Pada kegiatan implementasi program tersebut, penerapan implementasi suatu program dilakukan dengan menyesuaikan pedoman-pedoman serta aturan-aturan yang telah ditetapkan agar pengimplementasian program tersebut dapat tercapai dengan baik dan tujuan yang telah ditetapkan dapat terealisasi. Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Berdasarkan hal tersebut pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mencoba menggunakan model implementasi program milik Jones (1996) yang memiliki tiga pilar aktivitas mengoperasikan program yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan.

2.3.3 Proses Implementasi Program

Tahap implementasi sering disebut sebagai studi implementasi yang memberikan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan (Subianto, 2020). Proses implementasi terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu adanya program atau kebijakan, target kelompok sasaran, dan unsur pelaksana (implementor). Yudistira dalam Setiawan (2017) menjelaskan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi sebuah pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan baik besar ataupun kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Mulyadi (2015) berpendapat bahwa implementasi merupakan proses penerapan keputusan dasar yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan dalam mendukung proses implementasi tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu, kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, dan karakter institusi implementor (Kapioru, 2014). Selaras pendapat tersebut, Purwanto (2012) mengemukakan beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi dengan melihat kualitas kebijakan, kecukupan input kebijakan (terutama anggaran), ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan sumber daya manusia, koordinasi, dan pengawasan), karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, serta kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik di mana implementasi tersebut dilakukan.

Pada implementasi program terdapat kriteria pengukuran tingkat keberhasilan menurut Ripley dan Franklin dalam Akib dan Tarigan (2008) didasarkan pada tiga aspek yaitu:

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkat birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang
2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah
3. Pelaksanaan dan dampak atau manfaat yang dikehendaki dari semua program yang terarah.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat diketahui bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi suatu proses implementasi kebijakan/program ketika dilaksanakan yaitu harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana kebijakan/program tersebut akan diimplementasikan, kemudian isi dari kebijakan yang akan diimplementasikan harus berdampak baik dan berorientasi terhadap kebutuhan kelompok sasaran, serta dukungan sumberdaya yang dibutuhkan selama proses implementasi sedang berlangsung baik dalam bentuk manusia ataupun finansial serta sarana dan prasarana yang mendukung selama proses implementasi sedang berlangsung.

2.4 Program Klinik Inovasi

Inovasi memiliki peranan penting dalam mendorong perkembangan berbagai kegiatan disuatu daerah agar dapat terus berjalan. Inovasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk pengembangan daerah agar mampu bersaing dengan daerah lain melalui keunggulan produk/jasa yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, melalui Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagai seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pada indeks inovasi daerah juga terdapat suatu bentuk penghargaan untuk para daerah yang berhasil menciptakan inovasi yang inovatif serta dapat diimplementasikan dengan baik memperoleh pencapaian melalui *Innovative Government Award (IGA)*.

Sebagai wujud nyata partisipasi dalam mengikuti kegiatan program IID, Pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk pertama kalinya pada tahun 2020 mengikuti program tersebut yang pada akhirnya menunjukkan bahwa masih terdapat banyaknya perangkat daerah (Badan, Dinas, Biro, dan lainnya) yang belum mengetahui seberapa penting inovasi dilingkungan pemerintahan. Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung untuk pertama kali pada tahun 2022 sehingga membentuk suatu program berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan dengan pemerintah pusat yaitu program dengan nama “Klinik Inovasi”.

Klinik inovasi sendiri dibentuk sebagai upaya menciptakan wadah atau tempat yang dapat digunakan oleh para organisasi perangkat daerah yang ingin melaporkan bentuk inovasi yang akan dilakukan kepada indeks inovasi daerah. Tujuan utama dibentuknya klinik inovasi adalah untuk memperkenalkan dan membuka wawasan kepada perangkat-perangkat daerah mengenai inovasi. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya perangkat daerah yang kurang menyadari bagaimana bentuk inovasi itu sendiri sehingga tidak menyadari bahwa sebenarnya banyak inovasi yang sudah dilakukan melalui rangkaian kegiatan kerja. Klinik inovasi dibuka dengan jangka waktu tertentu yang selalu mengalami perubahan setiap tahunnya mulai dari proses pendaftaran sampai proses akhir. Klinik inovasi secara sederhana sama dengan klinik kesehatan yaitu memiliki tujuan untuk membantu. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung berperan penting dalam memberikan bantuan dan arahan serta konsultasi dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan operator pada setiap organisasi perangkat daerah mengenai langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftarkan bentuk inovasi yang dimiliki kepada indeks inovasi daerah.

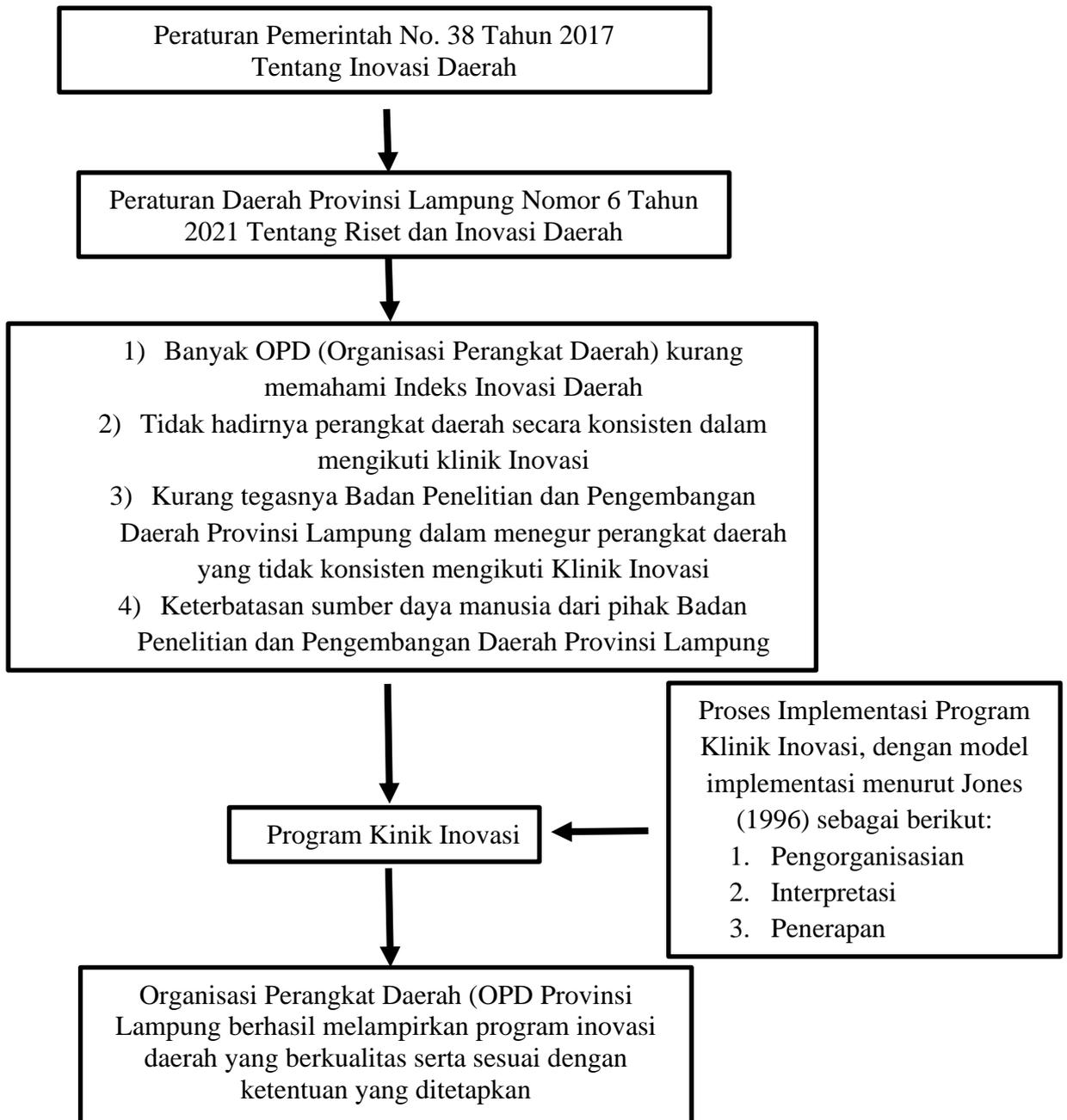
2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan program klinik inovasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Provinsi Lampung sebagai sarana konsultasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengembangan, penerapan, dan pelaporan inovasi daerah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan langsung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Permasalahan-permasalahan hadir ketika program klinik inovasi sudah diterapkan, antara lain: Masih terdapat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kurang memahami terkait pengimputan IID (Indeks Inovasi Daerah), tidak hadirnya perangkat daerah secara konsisten dalam mengikuti proses kegiatan program Klinik Inovasi, kurang tegasnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dalam menegur perangkat daerah yang tidak konsisten mengikuti Klinik Inovasi, tidak adanya sanksi dan regulasi yang pasti terkait dengan kedisiplinan perwakilan perangkat daerah yang dikirimkan, dan keterbatasan sumber daya manusia dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Namun, permasalahan tidak hanya berasal dari pihak eksternal melainkan hadir melalui pihak internal. Keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni dan memahami terkait pendampingan yang dilakukan pada klinik inovasi dalam penyampain informasi terkait indeks inovasi daerah masih menjadi catatan untuk pihak pelaksana program terkait dengan permasalahan yang hadir secara internal yang dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya.

Pada penelitian ini, untuk mengetahui proses implementasi program menggunakan indikator-indikator yang berasal dari beberapa model implementasi program yang dijadikan sebuah acuan serta batas-batas dalam proses implementasi program. Indikator tersebut dijadikan sebuah gambaran umum untuk melihat proses implementasi program, hal ini dilakukan agar peneliti masih memiliki panduan serta tidak terpaku pada satu implementasi program saja.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong dalam Sugiyono (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara memberikan penjelasan melalui data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang kemudian dideskripsikan dengan memberikan gambaran melalui pemanfaatan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana implementasi Program Klinik Inovasi dalam memberikan pendampingan indeks inovasi daerah Provinsi Lampung sehingga dapat memahami berbagai bentuk inovasi yang dapat diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan perkembangan zaman terjadi. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan dan menganalisis lebih mendalam berbagai data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara terhadap subjek penelitian yang berkaitan dengan tujuan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Program Klinik Inovasi Dalam Memberikan Pendampingan Indeks Inovasi Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir dan judul penelitian yang telah penulis gambarkan sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus bagaimana Implementasi Program Klinik Inovasi dalam memberikan pendampingan indeks inovasi daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung untuk mempermudah serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran fokus penelitian ini maka perlu dilakukan pembatasan fokus penelitian yang akan digunakan sebagai landasan dalam menulis hasil penelitian ini akan berfokus pada:

1. Implementasi program melalui teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996), artinya penelitian ini berfokus pada implementasi program dalam memberikan asistensi terhadap indeks inovasi daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Fokus analisis yang digunakan dalam penelitian mengenai indikator penting selama implementasi program berlangsung menurut Jones (1996) yang terdiri dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan sebagai berikut:

- 1) Pengorganisasian

Pada hal ini berkaitan dengan proses pengaturan dan penetapan pelaksana kebijakan yaitu organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program klinik inovasi di provinsi Lampung yang mencakup tentang:

1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi dalam tim pelaksanaan program klinik inovasi di lingkungan pemerintahan provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Riset dan Inovasi Daerah dan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Nomor 070/272/BID.IV/VI.06/2023 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator dan Pembahas Indikator Indeks Inovasi Daerah (IID). Untuk melihat apakah dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Lampung telah melakukan pembagian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program.

2. Sumber daya yang mendukung dalam implementasi program klinik inovasi. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana-prasarana. Pada sumber daya manusia meliputi fasilitator atau aktor yang terlibat langsung dalam penanganan klinik inovasi terkait dengan pemberian pendampingan mengenai indeks inovasi daerah (IID). Sumber daya finansial meliputi anggaran yang dikeluarkan, serta sarana-prasarana sebagai alat pendukung dalam menunjang implementasi program klinik inovasi berlangsung yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Metode dalam penyampaian informasi kegiatan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung kepada organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintahan provinsi Lampung dan inovasi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- 2) Interpretasi
- Pada tahap ini dilakukan dengan melihat bagaimana kebijakan dijabarkan menjadi teknis operasional. Interpretasi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada organisasi perangkat daerah di provinsi Lampung mengenai pemahaman tentang indeks inovasi daerah (IID) serta rencana pengarahannya yang tepat. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bentuk komunikasi yang terjalin antara pihak pelaksana program dan antar anggota Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung itu sendiri sebelum melakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang riset dan inovasi daerah.

3) Penerapan

Pada hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program klinik berdasarkan ketentuan rutin seperti standar operasional prosedur (SOP), pedoman kinerja, dan jadwal kegiatan.

2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi program klinik inovasi dalam memberikan asistensi terhadap indeks inovasi daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Faktor penghambat berkaitan dengan kendala yang dihadapi masing-masing pihak yang terlibat dalam implementasi program tersebut baik yang dirasakan oleh pihak pelaksana program ataupun kelompok sasaran program. Untuk faktor pendukung merupakan hal-hal yang menjadi dorongan sebagai bentuk upaya yang dilaksanakan untuk mampu mencapai tujuan dari program itu sendiri.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah atau tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Lokasi dan subjek yang dipilih dalam penelitian menjadi sumber informasi yang dapat menjawab apa saja yang berkaitan dengan rumusan penelitian. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung adalah karena Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan program yang bertujuan untuk memberikan pendampingan indeks inovasi daerah (IID) di Provinsi Lampung di mana telah melaksanakan program tersebut akan tetapi provinsi Lampung belum konsisten dalam pengembangan inovasi daerah melalui kenaikan dan penurunan pada peringkat indeks inovasi daerah. Sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dipilih menjadi lokasi pada penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong dalam Sugiyono (2017), sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang diperoleh melalui lisan atau tulisan yang dicermati oleh penulis, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa jenis pengumpulan data yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017) wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan informasi lintas waktu baik yang berkaitan dengan masa lampau, kondisi saat ini, dan masa yang akan datang dengan menghasilkan data yang bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian kualitatif. Melakukan wawancara akan membantu untuk mengetahui lebih banyak hal secara mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan keadaan yang terjadi.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Adapun yang menjadi informan, pada penelitian ini yaitu:

Tabel 4. Data Informan dalam Penelitian

No.	Informan	Data yang didapat
1.	Kepala Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah	Mengenai <i>follow-up</i> proses kordinasi lanjutan terkait monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan program klinik inovasi
2.	Kepala Sub Koordinator Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah	Menjadi <i>key informant</i> , perencanaan dan pelaksanaan program klinik inovasi
3.	Kepala Sub Koordinator Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana	Data catatan inovasi yang berhubungan dengan organisasi perangkat daerah yang mengikuti program klinik inovasi
4.	<i>Staff</i> Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah	Data mengenai anggaran dan organisasi perangkat daerah yang telah mengikuti kegiatan program klinik inovasi

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

2. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam pemusatan perhatian terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan menggunakan seluruh indera secara langsung dengan tujuan memperoleh data. Observasi mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan (Mamik, 2015). Pada penelitian ini, penulis mengamati pelaksanaan Program Klinik Inovasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data yang dibutuhkan selama penelitian berupa catatan, dokumen, peraturan-peraturan buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya (Siyoto, 2015). Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang bersumber pada Undang-Undang atau peraturan pemerintah, artikel jurnal, literatur, data-data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan implementasi Program Klinik Inovasi.

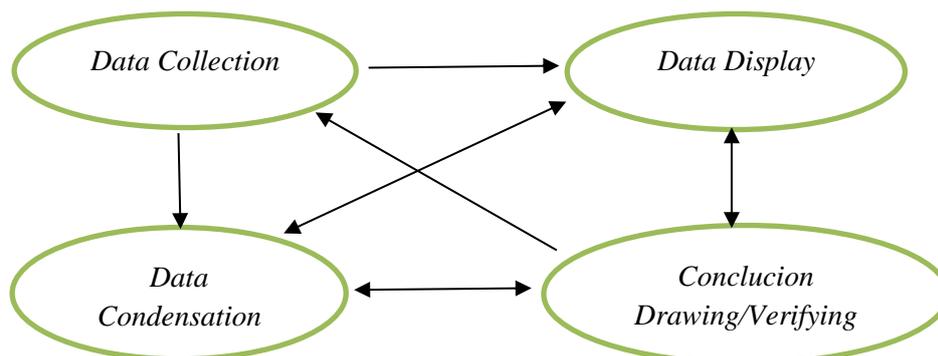
Tabel 5. Dokumentasi

No.	Dokumen	Substansi	Keterangan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017	Inovasi Daerah	Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Riset dan Inovasi Daerah	Riset dan Inovasi Daerah	Pemerintah daerah melakukan inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan manfaat ekonomi dan sosial
3.	Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pemerintahan daerah provinsi Lampung
4.	Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/642/VI.06/HK/2022	Pembentukan Tim dan Operator Inovasi Daerah Provinsi Lampung	Uraian tugas dan fungsi tim Pembina dan operator inovasi daerah provinsi Lampung
5.	Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung 2019-2024	Arah Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap peningkatan inovasi daerah di provinsi Lampung
6.	Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Nomor 070/272/BID.IV/VI.06.2023	Pembentukan Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, dan Pembahas Indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2023	Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian pendampingan indeks inovasi daerah di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
7.	SOP (Standar Operasional Prosedur)	Undangan kepada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung.	Jadwal pelaksanaan mengenai waktu, tempat, dan keperluan yang dibutuhkan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data sudah mulai dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles, Huberman, dan Saldana (2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dengan aktivitas analisis data meliputi:



Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif

Sumber: (Miles et al., 2014)

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, wawancara, dan dokumen-dokumen. Proses kondensasi data diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan. Dalam tahapan ini peneliti melakukan pemilihan terhadap data apa saja yang dibutuhkan untuk penelitian Implementasi Program Klinik Inovasi dalam memberikan pendampingan Indeks Inovasi Daerah (IID) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan Implementasi Program Klinik Inovasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Sehingga kegiatan

pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori atau *plan* tertentu menurut pandangan informan dapat dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data, mencatat pola, penjelasan, serta alur sebab akibat. Keseluruhan data yang sudah diperoleh pada akhirnya disimpulkan oleh peneliti dengan mengambil inti dari rangkaian penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan Implementasi Program Klinik Inovasi dalam memberikan pendampingan Indeks Inovasi Daerah (IID) di Provinsi Lampung.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Terkait teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif penting untuk diperhatikan karena data merupakan komponen yang krusial dalam penelitian. Data inilah yang akan digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan sehingga data yang didapatkan harus memenuhi syarat keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017) antara lain yaitu:

1. Uji kredibilitas (*Credibility*)

Data dapat dinyatakan kredibel atau dapat dipercaya jika terdapat persamaan antara apa yang dilaporkan penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya antara lain yaitu:

1) Perpanjangan waktu pengamatan

Perpanjangan pengamatan ini berarti penulis kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, kemudian wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui ataupun yang baru. Cara yang dapat dilakukan dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data adalah melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya mengandung kebenaran atau tidak ketika

disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi pada saat terjun langsung ke lapangan.

2) Triangulasi

Teknik triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. William Wiersma dalam Sugiyono (2017), menyatakan bahwa triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini pengecekan data akan menggunakan triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Melalui beberapa data yang sudah diperoleh dari sumber tersebut kemudian dideskripsikan dan dikategorikan mengenai cara pandang baik yang sama ataupun tidak.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Nilai transferabilitas tergantung pada pemahaman hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada situasi dan kondisi sosial yang lain maka penulis harus membuat laporan yang sistematis, jelas, terperinci, serta dapat dipercaya. Teknik ini dilakukan menggunakan uraian rinci, dengan melaporkan hasil penelitian secara cermat dan teliti yang menggambarkan kondisi tempat penelitian dilakukan.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Mulai dari bagaimana penulis menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat menunjukkan bukti terkait aktivitas lapangan yang telah dilakukan. Penelitian seperti ini perlu diuji *dependability* untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka penulis mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Uji Konfirmabilitas (*Konfirmability*)

Konfirmabilitas diartikan sebagai konsep *intersubjektivitas* (konsep transparansi) merupakan bentuk ketersediaan penulis mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen dalam penelitiannya dengan memberikan kesempatan pada pihak lain untuk melakukan penilaian terhadap temuannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal usul data, logika penarikan kesimpulan dari data yang sudah diperoleh, dan penilaian terhadap tingkat ketelitian serta pemahaman terhadap kegiatan penulis tentang keabsahan data. Pada tahapan ini yang melakukan pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapngan, peneliti menari kesimpulan akhir dalam implementasi program klinik inovasi dalam memberikan asistensi terhadap indeks inovasi daerah (IID) sebagai berikut:

5.1.1 Implementasi Program Klinik Inovasi Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

Program Klinik Inovasi yang dijalankan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung merupakan langkah positif dalam mendorong budaya inovasi di daerah. Klinik ini berfungsi sebagai wadah konsultasi dan koordinasi bagi perangkat daerah dalam mengembangkan, menerapkan, dan melaporkan inovasi daerah. Meskipun program ini telah berjalan, beberapa kendala perlu mendapat perhatian. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya pelaksana, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini dapat menghambat efektivitas Klinik Inovasi dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada perangkat daerah. Kendala lain yang dihadapi adalah pemahaman aktor pelaksana terkait inovasi daerah. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan misinterpretasi terhadap tujuan dan manfaat program Klinik Inovasi, sehingga menghambat partisipasi aktif dari perangkat daerah.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan peningkatan sumber daya pelaksana Klinik Inovasi, baik melalui pelatihan maupun penambahan sumberdaya pelaksana. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang

lebih gencar kepada perangkat daerah tentang inovasi daerah dan manfaat program Klinik Inovasi. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, diharapkan Program Klinik Inovasi dapat berjalan lebih optimal dan efektif dalam mendorong budaya inovasi di Provinsi Lampung. Klinik ini dapat menjadi sarana penting bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui inovasi.

5.1.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Klinik Inovasi

Implementasi program klinik inovasi dalam memberikan pendampingan Indeks Inovasi Daerah tidak terlepas dengan faktor pendukung dan faktor penghambat didalamnya selama program klinik inovasi sedang berlangsung. Faktor Pendukung dalam menunjang pelaksanaan program klinik inovasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung antara lain yaitu komitmen pihak pelaksana program yang kuat, antusiasme peserta yang hadir tinggi, sampai sarana dan prasarana dalam proses implementasi program klinik inovasi terpenuhi dengan baik dan lengkap.

Sementara itu, faktor penghambat hadir ketika melihat tingkat pemahaman serta komitmen organisasi perangkat daerah yang berbeda tentang indeks inovasi daerah serta terkait anggaran yang bervariasi dari setiap organisasi perangkat daerah untuk kegiatan yang menghasilkan suatu inovasi tersebut, kemudian teknik penyampaian materi yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk presentasi secara menyeluruh tidak berfokus pada satu materi terkesan terlalu luas dan cenderung menjadi membosankan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program klinik inovasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkungan organisasi pemerintahan provinsi Lampung, sebagaimana hasil kesimpulan diatas masih belum terlaksana secara optimal maka dari itu peneliti memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan internal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah terkait dengan perkembangan *innovative government award* yang pada setiap tahunnya selalu berubah-ubah.
2. Perlunya monitoring dan evaluasi serta sanksi berupa teguran dari sekretariat daerah terhadap perangkat daerah yang masih tidak mengikuti atau tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan indeks inovasi daerah melalui program klini inovasi.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melihat bagaimana kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyusunan profil inovasi daerah di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, A., Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 13-22.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala, R. (2020). *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Dwi, Bagus, & Suwanto. (2017). Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Melalui Bapermas PER dan KB Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UNDIP*, 6(2), 14-23.
- Ering, D., Tulusan, F., & Dengo, S. (2020). Implementasi Program Job Fair (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(89).
- Erna. (2009). Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Tesis Magister: Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara*
- Fauziyah, I. A., Rusli, B., & Ismanto, S. U. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cimahi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 224-237.
- Haedar, A., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca Agustus*, 1(1), 1-19.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

- Jones, C. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kapioru. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Khoiron, K., Rokhmah, D., & Istiaji, E. (2022). Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Lingkungan Ijen Geopark Wilayah Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Madaniya*, 3(1), 160-167.
- Listiansyah, A. (2024). Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Sekolah Menengah Atas Di Provinsi Lampung. *Skripsi Universitas Lampung*.
- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications
- Mulyadi. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, S. F., Kurniansyah, D., & Santoso, M. P. T. (2021). Implementasi Penerapan Aplikasi Sambara Dalam Administrasi Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 184-193.
- Mustari. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Nursifa. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Basi Kecamatan Basidono Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2575-2582.
- Pasolong. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pratama, B., & Burhanuddin, S. (2019). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Gotong Royong di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *E-Journal Pemerintahan Integratif*, 7(2), 276-285.
- Purwanto. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ramdhani & Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Rochaeni. (2023). Interpretasi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 8-17.

- Rumimpunu, S. R., Tampi, J. R., & Londa, V. Y. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kota Manado). *Agri-Sosioekonomi*, 17(2 MDK), 691-702.
- Sari, M. N. (2023). Implementasi Pengembangan Ruang Kepemudaan (Youth Space) di Kecamatan Coblong Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 367-373.
- Setiawan, I. (2017). Implementasi Inovasi Daerah Di Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 2(2), 83-97.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing
- Subianto. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Impelementasi, dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrinal & Casmiwati. (2024). Implementasi Program Generasi Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Kecamatan Kenjeren Kota Surabaya: *Journal of Public Administration*, 3(1), 46-56.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibowo. (2013). *Perilaku dalam Organisasi*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Widodo. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Peraturan-Peraturan

Peraturan Pmenerintah No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 Tentang Riset dan Inovasi Daerah

Peraturan Gubernur Lampung No. 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Keputusan Gubernur Lampung No. G/642/V1.06/HK/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Operator Inovasi Daerah Provinsi Lampung